

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang perjalanan sejarah RI pernah meletus suatu perlawanan rakyat terhadap pemerintah RI yang terjadi di daerah Sulawesi tepatnya Sulawesi Selatan. Para pelaku pemberontakan di daerah itu menggabungkan diri kedalam Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh seorang patriot pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan Indonesia yaitu Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar memiliki nama lengkap Abdul Qahhar Mudzakkar, akan tetapi ia lebih dikenal dengan nama Kahar Muzakkar.

Pada masa revolusi fisik pada tahun 1945-1949 Sulawesi Selatan cukup menonjol sebagai tempat perlawanan yang paling hebat di luar pusat Republik dalam menentang upaya kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Tidak sedikit kalangan pemuda dari daerah ini yang ikut turut langsung dalam kancah revolusi fisik di Pulau Jawa.

Sejak masa pendudukan militer Jepang, para pemuda Sulawesi Selatan di Jawa menggabungkan diri dalam Pembela Tanah Air (Peta) ,organisasi semi militer bentukan Jepang. Dari keterlibatan di Peta inilah mereka terlibat mendorong lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Kekalahan dan penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang dijadikan sebuah pelajaran dan inspirasi untuk bergolak.

Pada fase awal kemerdekaan, rakyat di daerah Sulawesi Selatan mengalami keterbelahan dalam beberapa kelompok. Kelompok utama adalah kalangan elit feodal lokal dan kaum bangsawan, kalangan ambtenaar dan pasukan KNIL yang aktif menjalin kerjasama dengan Belanda. Lalu ada kelompok kaum nasionalis atau kalangan republiken yang didalamnya termasuk pemuda revolusioner yang berpusat di kota Makassar. Selain dua kelompok tadi ada juga kelompok kecil para pemuda yang terlibat langsung dalam kancah revolusi fisik di Pulau Jawa. Mereka merupakan kalangan terpelajar dan menerima pendidikan lebih baik. Mereka juga bersentuhan langsung dengan kalangan pergerakan di pusat perjuangan nonfisik di Pulau Jawa. (Syafaruddin Usman, 2010; 21)

Setelah kembali ke kampung halamannya ,para pemuda yang bertempur di Jawa dalam kesehariannya mereka sangat nyata memperlihatkan kebenciannya terhadap kalangan yang memilih bergabung dengan kolonial Belanda. Disisi lain, kalangan pemuda ini ada yang kecewa karena setelah perjuangan fisik yang melibatkan diri mereka, namun kemudian saat mereka bermaksud menggabungkan diri dalam militer Indonesia, mereka tereliminasi. Akibatnya, mereka memilih untuk mendirikan militer sendiri, namun tetap dalam bingkai anti kehadiran kembali militer Belanda

Penyelesaian masalah gerilya setelah Perang Kemerdekaan berakhir, berkembang memasuki arena politik pada tingkat nasional. Para anggota gerilya di Sulawesi Selatan mencoba mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi yang mereka namakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang memiliki kekuatan 10 batalyon. Pengambil inisiatif untuk membentuk organisasi ini adalah

Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar merupakan seorang tokoh yang mempunyai pengaruh cukup besar di Sulawesi Selatan sejak periode pemerintahan Pendudukan Jepang pada tahun 1942. Dalam salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Kahar Muzakkar menyatakan bahwa,

“ keamanan hanya dapat terjamin apabila pasukan-2 gerilya jang tergabung dalam K.G.S.S. segera di-consolideerd dan diresmikan menjadi tentara APRIS, sesuai dengan djasa-2 dan pendidikan serta pengalaman mereka dalam perdjjuangan membela proklamasi 17 Agustus 1945, empat setengah tahu jang lalu”. (Anhar Gonggong, 1992; 95)

Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dibentuk oleh Saleh Sahban atas perintah Kahar Muzakkar sebetulnya merupakan organisasi kaum revolusioner yang bertujuan untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mereka dan memberikan Kahar Muzakkar pengikut yang kuat untuk mendukung tuntutannya atas kedudukan komando territorial. Disini jelas terlihat bahwa Kahar Muzakkar bukan lagi semata-mata berjuang untuk kepentingan anak buahnya tetapi untuk kepentingan pribadinya dalam meraih kedudukan yang lebih tinggi. (Terminologi sejarah, 1996 ; 231-233)

Unsur budaya *sirri'-pesse'* merupakan salah satu unsur budaya amat penting dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Unsur itu menjadi alat pengikat antara diri Kahar Muzakkar dengan para pendukungnya. *Sirri'* tidak hanya bermakna malu yang sangat dalam, tetapi juga bermakna mempertahankan harga diri dengan mempertaruhkan nyawa. Hal itulah yang telah menjadi pendorong Kahar Muzakkar bersama pendukungnya untuk menghadapi pihak yang dianggap sebagai musuh mereka saat itu ,yaitu pemerintah negara RI. Mereka menganggap pemerintah RI pimpinan Presiden Soekarno telah menginjak-nginjak *sirri'* mereka, karena telah menolak mereka untuk menjadi anggota APRI dan

membentuk suatu kesatuan tersendiri dengan nama pahlawan Hasanuddin. Selain unsur *sirri* ada juga unsur lainnya yaitu *pesse* yang melahirkan perasaan sebagai warga sekaum atau saudara sebagai orang Bugis-Makassar dan Mandar.

Pemerintah Pusat RI melalui Panglima TT VII/Wirabuana Kolonel A. Kawilarang yang pada waktu itu menguasai Indonesia Timur, menolak keinginan Kahar Muzakkar dan pendukungnya untuk membentuk Brigade Hasanuddin. Menurut keputusan Panglima TT VII Kolonel Kawilarang, gerilyawan KGSS itu hanya diterima secara perorangan kedalam angkatan bersenjata melalui seleksi ketat. Jumlah gerilyawan KGSS sudah meliputi satu divisi, sedangkan yang bisa diterima hanya sebanyak satu kompi.

Untuk mengatasi masalah ini, Kahar Muzakkar memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada Panglima TT VII agar divisi KGSS dapat diterima seluruhnya menjadi tentara. Namun permohonan itu ditolak. Dengan adanya penolakan tersebut maka telah menutup jalan damai dalam penyelesaian masalah gerilya di Sulawesi Selatan.

Hal inilah yang melahirkan kekecewaan dikalangan para gerilyawan KGSS dan pada akhirnya mereka membangkang dan memutuskan untuk melarikan diri masuk kedalam hutan untuk melakukan pemberontakan. Sejak tahun 1950 sampai 1952 telah ditempuh berbagai langkah namun menemui jalan buntu. Akhirnya Kahar Muzakkar bersama pendukungnya membentuk suatu kesatuan tersendiri dengan para pengikutnya yang sebagian besar merupakan bekas anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Kahar Muzakkar menjadi pemimpin utamanya.

Sementara itu dalam proses waktu antara tahun 1952 sampai 1953 terjalin hubungan yang intensif antara Kartosuwirjo sebagai pimpinan gerakan DI/TII di Indonesia dan menyebut dirinya sebagai imam dengan Kahar Muzakkar melalui kurir masing-masing. Akhirnya keduanya sepakat untuk menggabungkan kekuatan gerakan mereka. Pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar menggabungkan gerakannya sebagai bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat.(Bahar Mattaliu, 1994;185)

Pernyataan Kahar Muzakkar yang memasukkan pasukan-pasukan dan wilayah kekuasaannya sebagai bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo telah mengubah landasan ideologi gerakan pemberontakan di Sulawesi Selatan itu. Hal itu berarti Islam telah menjadi landasan ideologi gerakannya dan mengesampingkan Pancasila yang menurutnya tidak memiliki kekuatan moral untuk menjadi dasar dan ideologi negara.

Penggabungan gerakan pimpinan Kahar Muzakkar sebagai bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo membuka pula jalan baginya untuk menyebut gerakannya sebagai gerakan DI/TII yang bertujuan mendirikan NII. Dengan penggunaan nama dan tujuan tersebut, Kahar Muzakkar berharap akan memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam.(Sejarah Nasional Indonesia VI, 1992;)

Dari pihak pemerintah segera melakukan operasi militer untuk membendung pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Operasi militer dilakukan secara lebih terorganisir tetapi sekaligus diadakan pendekatan damai terhadap tokoh-tokoh pemberontak. Sampai tahun 1962 daerah

yang belum dapat diselesaikan masalah keamanannya adalah Sulawesi Selatan Tenggara. Di daerah ini gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar masih melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Didalam melanjutkan perlawanannya itu Kahar Muzakkar melakukan langkah-langkah untuk memperkuat diri.

Hal ini didukung pula dengan bergabungnya PRRI/Permesta yang melakukan pendekatan kepada pimpinan DI/TII Aceh dan Sulawesi. Penggabungan ini akhirnya melahirkan Republik Persatuan Indonesia (RPI). RPI gagal dan dilanjutkan dengan membentuk Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). RPII juga tidak mengalami keberhasilan. Sementara itu pihak pemerintah secara intensif melakukan operasi militer yang mana akhirnya berhasil menyergap dan menembak mati Kahar Muzakkar pada tanggal 3 Februari 1965 yang mengaku sebagai pejabat khalifah presiden RPII.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kahar Muzakkar turut serta dalam perjuangan fisik melawan Belanda pada masa awal kemerdekaan RI.
- b. Kahar Muzakkar membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).
- c. Kahar Muzakkar berperan sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, diharapkan dalam penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah “bagaimanakah peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan?”.

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi tentang adanya peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan :

1. Dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan tambahan informasi tentang peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.
2. Dapat berguna sebagai suplemen bahan ajar guru mata pelajaran sejarah di SMA kelas XII semester satu pada sub pokok bahasan pemberontakan di daerah-daerah.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup yang menjadi objek penelitian adalah peranan Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Pemberontakan DI/TII di daerah Sulawesi Selatan. Pendekatan ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kesejarahan karena menyangkut masalah sejarah. Tempat penelitian di Perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan Universitas Lampung. Penelitian dilakukan pada tahun 2010. Temporal penelitian ini dari tahun 1950 sampai 1965. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian historis.

REFERENSI

- Syafaruddin Usman .2010. *Tragedi Patriot dan Pemberontakan Kahar Muzakkar*. Narasi; Yogyakarta.
- Depdikbud.1996. *Terminologi Sejarah*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional; Jakarta, hlm. 231-233.
- Anhar Gonggong.1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. PT Grasindo; Jakarta, hlm.95.
- C. Van Dijk.1995. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. PT Pustaka Utama Grafiti; Jakarta.